

PENGADILAN AGAMA SUMENEP

LAPORAN KEUANGAN

Tahun 2023

Jl. Trunojoyo Km. 03, No. 300, Gedung, Batuan

Sumenep - Jawa Timur 69541

Telp: (0328) 662453 Fax: (0328) 672816

e-mail: pasumenep@gmail.com



LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA SUMENEP

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2023

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Trunojoyo Km. 03, No. 300, Gedung, Batuan

Telp. (0328) 662453 Fax. (0328) 672816

Sumenep - Jawa Timur 69541

e-mail: pasumenep@gmail.com

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Sumenep adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Sumenep mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Sumenep. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sumenep, 30 Juni 2023 Kuasa

Pengguna Anggaran,

Sekretaris,



ELLY KUSDIANA HOBAIDAH, S.Ag.

NIP. 197804022003122005

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel dan Lampiran	1
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	10
I. Laporan Realisasi Anggaran	15
II. Neraca	17
III. Laporan Operasional	20
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	22
V. Catatan atas Laporan Keuangan	24
A. Penjelasan Umum	24
A.1. Dasar Hukum.....	24
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Sumenep	25
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	26
A.4. Basis Akuntansi	26
A.5. Dasar Pengukuran	27
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	27
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	35
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	35
B.2. Belanja.....	35
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	39
C.1. Aset Lancar.....	39
C.2. Aset Tetap	40
C.5. Kewajiban Jangka Pendek	45
C.6. Ekuitas	46
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	46
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	46
D.2. Beban Pegawai	46

D.3.	Beban Persediaan	47
D.4.	Beban Barang dan Jasa	48
D.5.	Beban Pemeliharaan	48
D.6.	Beban Perjalanan Dinas	49
D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	49
D.8.	Beban Bantuan Sosial.....	50
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	50
D.10.	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	51
D.11.	Beban Lain-lain.....	52
D.12.	Kegiatan Non Operasional	52
D.13.	Pos Luar Biasa	53
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	53
E.1.	Ekuitas Awal	53
E.2.	Surplus (defisit) LO	53
E.3.	Koreksi Nilai Persediaan.....	54
E.4.	Koreksi Aset Tetap	54
E.5.	Koreksi atas Beban	54
E.6.	Koreksi atas Pendapatan.....	55
E.7.	Ekuitas Akhir.....	55
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	55
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	55
F.2.	Pengungkapan Lain-lain	55
	Laporan-laporan Pendukung.....	58
	Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap	59

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2023 dan 2022	10
Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni TA 2023 dan 2022	11
Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang	33
Tabel 4 Tabel Masa Manfaat.....	34
Tabel 5 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2023	35
Tabel 6 Perbandingan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2023 dan 2022.....	35
Tabel 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2023	36
Tabel 8 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2023	36
Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2023 dan TA 2022.....	36
Tabel 10 Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni TA 2023 dan TA 2022	37
Tabel 11 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2023 dan TA 2022	38
Tabel 12 Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni TA 2023 dan TA 2022	38
Tabel 13 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2023 dan 2022	39
Tabel 14 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran	40
Tabel 15 Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2023 dan 30 Juni TA 2022.....	40
Tabel 16 Rincian Aset Tetap.....	40
Tabel 17 Rincian Saldo Tanah	41
Tabel 18 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	44
Tabel 19. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2023 dan 2022.....	45
Tabel 20. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga	45
Tabel 21 Rincian nilai perolehan, Akumulasi Penyusutan, dauku A Tetap untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 22 Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua.....	62

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Agama Sumenep

Jl. Trunojoyo Km.03 No.300, Gedung, Batuan, Sumenep - Jawa Timur 67223
Telp. (0328 662453 Fax. (0328 672816 e-mail : pasumenep@gmail.com

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Sumenep yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Sumenep telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Sumenep, 30 Juni 2023 Kuasa
Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

ELLY KUSDIANA HOBAIDAH, S.Ag.
NIP. 197804022003122005

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Sumenep Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2023 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2023 s.d. 30 Juni 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 2.400.000,- atau mencapai 200,00 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp.1.200.000,-.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2023 adalah sebesar Rp. 4.950.199.428,- atau mencapai 99,62 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 4.969.313.000,-.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2023 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2023 dan 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran	Realisasi	% real. Thd anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	1.200.000	2.400.000	200,00	2.502.000
Belanja Negara	4.969.313.000	4.950.199.428	99,62	5.110.779.225

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2023 dan 2022.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 30 Juni 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 24.910.555.935,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 736.000,- Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 24.909.819.935,- Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp. 0,- dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 0,-

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp. 7.945.468,- yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp 7.945.468,- dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp. 0,-.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp. 24.902.610.467,- yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp. 24.902.610.467,- dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp. 0,-.

Ringkasan Neraca per 30 Juni 2023 dan 2022 dapat sajikan sebagai berikut:

Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni TA 2023 dan 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/ (Penurunan)	
	2023	2022	Rp.	%
Aset				
Aset Lancar	736.000	10.411.220	(9.675.220)	(92,93)
Aset Tetap	24.909.819.935	25.087.611.491	(177.791.556)	(0,71)
Aset Lainnya	0	0	0	0
Piutang Jangka Panjang	0	0	0	0
Jumlah Aset	24.910.555.935	25.098.022.711	(187.466.776)	(0,75)
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	7.945.468	22.611.062	(14.665.594)	(64,86)
Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0
Jumlah Kewajiban	7.945.468	22.611.062	(14.665.594)	(64,86)
Ekuitas Dana				
Ekuitas Dana Lancar	24.902.610.467	25.075.411.649	(164.855.714)	(0,66)
Ekuitas Dana Investasi	0	0	0	0,00
Jumlah Ekuitas Dana	24.902.610.467	25.075.411.649	(164.855.714)	(0,66)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	24.910.555.935	25.098.022.711	(187.466.776)	(0,75)

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus (defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus (defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp. 2.400.000,-, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 5.445.824.629,- sehingga terdapat surplus (defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp. (5.445.824.629),-. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp. 0,- dan surplus (defisit) sebesar Rp. 0,- sehingga entitas mengalami surplus (defisit) -LO sebesar Rp. (5.445.824.629),-.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp. 25.075.411.649,- dikurangi surplus (defisit)-LO sebesar Rp. ((5.443.424.629),- kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0,- dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 5.270.623.447,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp. 24.902.610.467,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2023, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 Juni 2023, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan

timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN AGAMA SUMENEP
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2023 DAN 2022
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2023			TA 2022
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	1,200,000	2,400,000	200	2,502,000
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		1,200,000	2,400,000	200	2,502,000
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	2,842,467,000	2,824,059,223	99.35	2,737,605,551
2.	Belanja Barang	B.2.2.	1,911,846,000	1,911,640,205	99.99	1,649,269,674
3.	Belanja Modal	B.2.3.	210,000,000	209,500,000	99.76	723,904,000
	Jumlah Belanja Negara		4,969,313,000	4,945,199,428	99.51	5,110,779,225

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN AGAMA SUMENEP
NERACA
PER 30 Juni 2023 DAN 2022
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2023	30 Juni 2022
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Persediaan	C.1. 1.	736,000	10,411,220
Jumlah Aset Lancar		736,000	10,411,220
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2. 1.	17,358,918,000	17,358,918,000
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	4,421,113,448	3,856,541,698
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	7,112,928,000	6,426,524,000
Aset Tetap Lainnya	C.2. 4.	21,075,629	21,075,629
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 5.	0	686,404,000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 6.	(4,004,215,142)	(2.863.441.824)
Jumlah Aset Tetap		24,909,819,935	25,087,611,491
Aset Lainnya	C.3		
Aset Lain-lain	C.3. 1.	10,471,653	10,471,653
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset	C.3. 2.	(10,471,653)	(10,471,653)
Jumlah Aset Lainnya		0	0
Jumlah Aset		24,910,555,935	25,098,022,711
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.4		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4. 1.	7,945,468	22,611,062
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		7,945,468	22,611,062
Jumlah Kewajiban		7,945,468	22,611,062
EKUITAS			
Ekuitas	C.5		

Ekuitas	C.5.	1.	24,902,610,467	25,075,411,649
Jumlah Ekuitas			24,902,610,467	25,075,411,649
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas			24,910,555,935	25,098,022,711

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN AGAMA SUMENEP LAPORAN OPERASIONAL PER 30 Juni 2023 DAN 2022 (dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2023	30 Juni 2022
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	2,400,000	2,502,000
Jumlah Pendapatan		2,400,000	2,502,000
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	2,799,919,492	2,749,074,551
Beban Persediaan	D. 3	36,318,500	14,492,250
Beban Barang dan Jasa	D. 4	1,285,859,111	1,101,555,735
Beban Pemeliharaan	D. 5	502,679,220	446,747,380
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	92,347,000	82,752,000
Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	728,701,306	472,469,466
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		5,445,824,629	4,867,091,382
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(5,443,424,629)	(4,864,589,382)
Kegiatan Non Operasional			
D. 12			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		0	0

Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	0	0
Pos Luar Biasa	D. 13	
Pendapatan PNB	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0
Beban Persediaan	0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	(5,443,424,629)	(4,864,589,382)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN AGAMA SUMENEP
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 Juni 2023 DAN 2022
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2023	30 Juni 2022
Ekuitas Awal	E. 1	25.075.411.649	23,274,196,797
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(5,443,424,629)	(4,864,589,382)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar			
Lain-lain			
Koreksi Nilai Persediaan	E. 3	0	0
Koreksi Aset Tetap	E. 4	0	0
Koreksi Atas Beban	E. 5	0	0
Koreksi Atas pendapatan	E. 6	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 7	0	0
Jumlah Lain-lain		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 8	5,270,623,447	6,665,804,234
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	E. 9	(172,801,182)	1,801,214,852
Ekuitas Akhir		24,902,610,467	25,075,411,649

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. *CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN*

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan

Akun Standar;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Sumenep

Visi Pengadilan Agama Sumenep adalah “Terwujudnya Pengadilan Agama Sumenep Yang Agung”.

Misi Pengadilan Agama Sumenep adalah :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Sumenep.
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Agama Sumenep.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Sumenep.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Sumenep melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Membangun Budaya Kerja Profesional
3. Pemanfaatan Tehnologi Informasi

4. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
5. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
6. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
7. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Sumenep adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah,

dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 300.000 (*tiga ratus ribu rupiah*);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

c. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8.) Penyisihan Utang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

(9.) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 1. Tanah
 2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
 - Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
 - Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Tabel Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

(10.) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 30 Juni 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah : Rp.
2.400.000*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp. 2.400.000,- atau mencapai 200,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 1.200.000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Sumenep adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Tabel 5 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.200.000,00	2.400.000,00	200,00
	Total Pendapatan	1.200.000,00	2.400.000,00	200,00

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA

mengalami penurunan sebesar Rp. 102.000,- atau 4,07% dibandingkan TA 2022. Hal ini di sebabkan karena :

1. Terdapat perubahan harga penarikan pendapatan negara bukan pajak.

Tabel 6 Perbandingan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2023 dan 2022
Perbandingan realisasi PNBP TA 2023 dan 2022 disajikan dalam tabel dibawah ini :

No.	Uraian	TA	2022	Perubahan	
				Rp.	%
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	2.400.000,00	2.502.000,00	102.000,00	4,07
	Total Pendapatan	2.400.000,00	2.502.000,00	102.000,00	4,07

B.2. Belanja

*Realisasi
Belanja
Negara : Rp.
4.945.199.428*

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Sumenep per 30 Juni TA

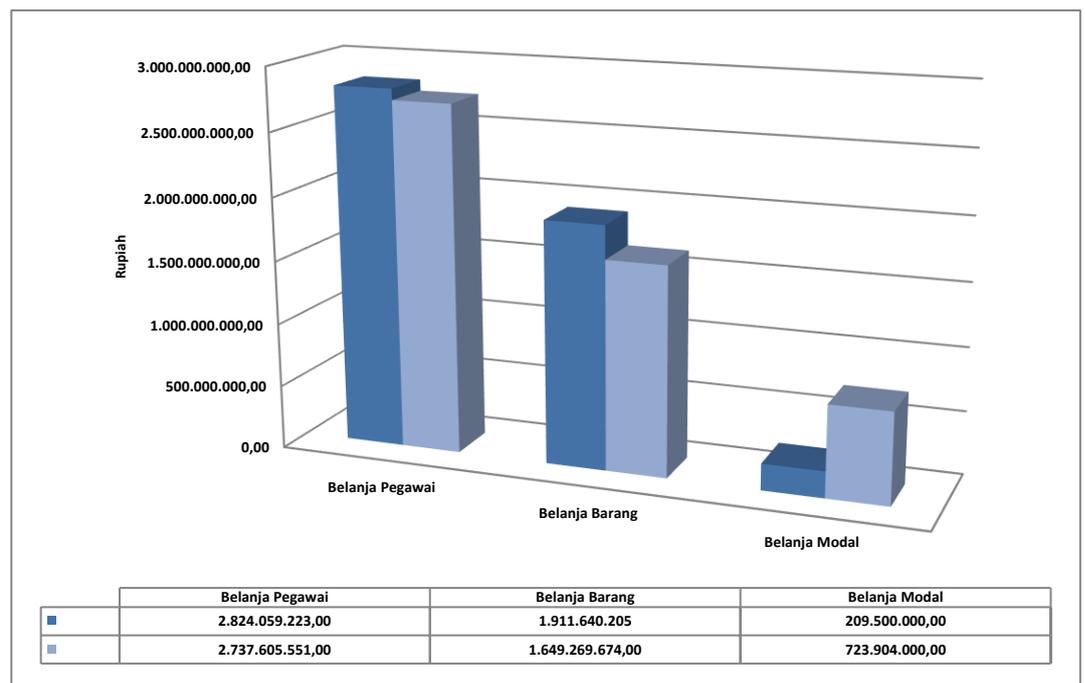
adalah sebesar Rp. 4.945.199.428,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2023		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	2,842,467,000	2,824,059,223	99.35
Belanja Barang	1,911,846,000	1,911,640,205	99.99
Belanja Modal	210,000,000	209,500,000	99.76
Total Belanja Bruto	4,969,313,000	4,945,199,428	99.51
Pengembalian Belanja	0	0	0
Total Belanja Netto	4,969,313,000	4,945,199,428	99.51

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 8 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2023
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA)

& 2022

Realisasi Belanja Negara mengalami penurunan sebesar Rp. 165.579.797,- atau sebesar 3,24% dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama.

Perbandingan realisasi belanja TA 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun)	
			Rp.	%
Belanja Pegawai	2,824,059,223	2,737,605,551	86,453,672	3,16
Belanja Barang	1,911,640,205	1,649,269,674	262,370,531	15,91
Belanja Modal	209,500,000	723,904,000	(514,404,000)	(71,06)
Total Belanja	4,945,199,428	5,110,779,225	(165,579,797)	(3,24)

B.2.1. Belanja Pegawai

*Realisasi
Belanja
Pegawai : Rp.
2.824.059.223*

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Sumenep per 30 Juni 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp. 2.824.059.223,- dan Rp. 2.737.605.551,-.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 3,16% dibandingkan realisasi belanja pegawai TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain: 1. Penambahan jumlah pegawai.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 10 Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	1,040,441,960	1,044,271,280	(3.829.320)	(0,37)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	15,077	14,414	663	4,60
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	69,723,160	72,549,502	(2.826.342)	(3,90)
Belanja Tunj. Anak PNS	23,561,680	24,804,830	(1.243.150)	(5,01)
Belanja Tunj. Struktural PNS	29,360,000	35,420,000	(6.060.000)	(17,11)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,263,460,000	1,201,345,000	62.115.000	5,17
Belanja Tunj. PPh PNS	152,946,306	147,664,269	5.282.037	3,58
Belanja Tunj. Beras PNS	55,184,040	54,532,260	651.780	1,20
Belanja Uang Makan PNS	175,302,000	152,259,000	23.043.000	15,13
Belanja Tunjangan Umum PNS	14,065,000	4,745,000	9.320.000	196,42
Total Belanja Brutto	2,824,059,223	2,737,605,555	86.453.668	3,16
Pengembalian Belanja	18,585,731	4	18.585.727	464643175,00
Total Belanja Netto	2,805,473,492	2,737,605,551	67.867.941	2,48

B.2.2. Belanja Barang

*Realisasi
Belanja Barang
: Rp.
1.916.640.205*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Sumenep per 30 Juni TA 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp. 1.916.640.205,- dan Rp. 1.649.269.674,-.

Realisasi belanja barang TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 16,21% dibandingkan realisasi belanja barang TA 2022.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp.	%
Belanja Barang Operasional	1,102,931,539	931,247,600	171.683.939	18,44
Belanja Barang Non Operasional	4,350,000	5,000,000	(650.000)	(13,00)
Belanja Jasa	187,689,166	163,283,674	24.405.492	14,95
Belanja Pemeliharaan	489,527,500	439,974,900	49.552.600	11,26
Belanja Perjalanan Dinas	92,347,000	82,752,000	9.595.000	11,59
Belanja Barang Persediaan	39,795,000	27,011,500	12.783.500	47,33
Total Belanja Brutto	1,916,640,205	1,649,269,674	267.370.531	16,21
Pengembalian Belanja	0	0	0	0,00
Total Belanja Netto	1,916,640,205	1,649,269,674	267.370.531	16,21

B.2.3. Belanja Modal

*Realisasi
Belanja Modal
:Rp.
209.500.000*

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Agama Sumenep per 30 Juni TA 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp. 209.500.000,- dan Rp. 686,404,000,-.

Realisasi belanja modal TA 2023 mengalami penurunan sebesar 69,48,7% dibandingkan Realisasi belanja modal TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain :

1. Pelaksanaan pengadaan belanja modal pada tahun 2023 hanya penambahan aset peralatan dan mesin, sedangkan pada tahun 2022 diperuntukan untuk renovasi rumah dinas.

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 12 Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Perubahan	
			Rp.	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	209,500,000	686,404,000	(476,904,000)	(69,48)
Belanja Modal Lainnya	0	0	-	-
Total Belanja Brutto	209,500,000	686,404,000	(476,904,000)	(69,48)
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	209,500,000	686,404,000	(476,904,000)	(69,48)

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

*Aset Lancar:
Rp. 15.452.500*

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 736.000,- dan Rp. 10.411.220,-.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Sumenep per 30 Juni 2023 dan 2022 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 13 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2023 dan 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022
Persediaan	736,000	10,411,220
Total Aset Lancar	736,000	10,411,220

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp. 0*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Penggantian Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Tabel 14 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni TA 2023	30 Juni TA 2022
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Jumlah		0	0

C.1.2. Persediaan

*Persediaan:
Rp. 736.000*

Persediaan per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 736.000,- dan Rp. 10.411.220,-. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 15 Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2023 30 Juni TA 2022

No.	Uraian	30 Juni 2023	30 Juni 2022
1	Barang Konsumsi	736,000	7,486,500
2	Bahan Untuk Pemeliharaan		2,924,720
Total		736,000	10,411,220

C.2. Aset Tetap

*Aset Tetap : Rp.
24.909.819.935*

Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2023 dan 2022 tersaji sebesar Rp. 24.909.819.935,- dan Rp. 25.087.611.491,-. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 16 Rincian Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2023	TA 2022	Perubahan
1	Tanah	17,358,918,000	17,358,918,000	0
2	Peralatan dan Mesin	4,421,113,448	3,856,541,698	564,571,750
3	Gedung dan Bangunan	7,112,928,000	6,426,524,000	686,404,000
4	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	10,471,653	10,471,653	0

5	Konstruksi dan Bangunan	0	686,404,000	(686,404,000)
6	Aset Tetap Lainnya	21,075,629	21,075,629	0
7	(Akumulasi Penyusutan)	(4.004.215.142)	(3,261,851,836)	(742,363,306)
	Jumlah	24,909,819,935	25,087,611,491	(177,791,556)
	Nilai Buku Aset Tetap	24,909,819,935	25,087,611,491	(177,791,556)

C.2.1. Tanah

Tanah: Rp.
17.358.918.000

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 17.358.918.000,- dan Rp. 17.358.918.000,-.

Rincian saldo tanah per tanggal per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 17 Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
Jumlah						17,358,918,000

Tetap karena tidak ada pengadaan tanah baru di Kantor Pengadilan Agama Sumenep Tahun Anggaran 2023 yang terletak di Jalan Trunojoyo Km. 03, No. 300, Gedung, Batuan, Kabupaten Sumenep.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan
Mesin : Rp.
4.421.113.448

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 4.421.113.448,- dan Rp. 3.856.541.698,-.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2023	3,856,541,698
Mutasi Tambah	564,571,750
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2023	4,421,113,448
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2023	(2,904,640,601)
Nilai Buku 30 Juni 2023	1,516,472,847

Terdapat mutasi tambah sebesar Rp. 564.571.750,- berupa peralatan dan mesin selama tahun 2023.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan : Rp.
7.112.928.000*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 7.112.928.000,- dan Rp. 6.426.524.000,-.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2023	6,426,524,000
Mutasi Tambah	686,404,000
Mutasi Kurang	
Saldo per 30 Juni 2023	7,112,928,000
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2023	(1,099,574,541)
Nilai Buku 30 Juni 2023	6,013,353,459

Terdapat mutasi tambah sebesar Rp. 686.404.000,- berupa Gedung dan bangunan selama tahun 2023.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan ,
Irigasi, dan
Jaringan : Rp.
0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2023	0
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	

Saldo per 30 Juni 2023	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2023	0
Nilai Buku 30 Juni 2023	0

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya: Rp. 24.284.387

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 21,075,629 dan Rp. 21,075,629.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2023	21,075,629
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 30 Juni 2023	21,075,629
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2023	0
Nilai Buku 30 Juni 2023	21,075,629

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan : Rp. 0

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 686,404,000

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2023	686,404,000
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	(686,404,000)
Saldo per 30 Juni 2023	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2023	0
Nilai Buku 30 Juni 2023	0

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan Aset
tetap : Rp.
(4.004.215.142)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp. (4.004.215.142),- dan Rp. (3.261.851.836),-.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2023 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Tabel 18 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	17,358,918,000	0	17,358,918,000
2	Peralatan dan Mesin	4,421,113,448	(2,904,640,601)	1,516,472,847
3	Gedung dan Bangunan	7,112,928,000	(1,099,574,541)	6,013,353,459
4	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	10,471,653	(10,471,653)	0
5	Aset Tetap Lainnya	21,075,629	0	21.075.629
	Jumlah	28,924,506,730	4,014,686,795	24,909,819,935

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban
Jangka Pendek :
Rp. 7.945.468*

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 7.945.468,- dan Rp. 22.611.062,-. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, sedangkan per 30 Juni 2023 tercatat sebesar Rp. 7.945.468,-.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Agama Sumenep per 30 Juni 2023 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 19. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023	TA 2022
Utang Kepada Pihak Ketiga	7,945,468	22,611,062
Jumlah	7,945,468	22,611,062

C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

*Utang kepada
Pihak Ketiga:
Rp. 386.930.999*

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 7.945.468,- dan Rp. Rp. 22.611.062,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga Pengadilan Agama Sumenep per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 20. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

No.	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1	Utang Kepada Pihak Ketiga	7.945.468	Tagihan air, tagihan telpon, dan tagihan uang makan yang belum dibayarkan.
	Jumlah	7.945.468	

C.5.2. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari
KPPN:
Rp. 0*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni

Rp. 0,- dan Rp. 0,- Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) dan tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.6. Ekuitas

*Cadangan
Piutang:
Rp.
24.902.610.467*

Ekuitas per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 24.902.610.467,- dan Rp. 25.075.411.649,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Per tanggal 30 Juni 2023 terdapat penurunan nilai Ekuitas sebesar Rp. (172.801.182),- atau (0.69%) dari nilai per 30 Juni 2022. Jumlah nilai Ekuitas pada periode yang berakhir 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp. 24.902.610.467,-, sedangkan per 30 Juni 2022 tercatat sebesar Rp. 25.075.411.649.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*Pendapatan
PNBP : Rp.
2.400.000*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp. 2.400.000,- dan Rp. 2.502.000,- Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 36 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.200.000	2.400.000	200
Total Pendapatan		1.200.000	2.400.000	200

D.2. Beban Pegawai

*Beban Pegawai
: Rp.
2.799.919.492*

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.799.919.492,- dan Rp. 2.749.074.551,-. Beban Pegawai adalah

beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 37 Rincian Beban Pegawai per 30 Juni TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	1,040,441,960	1,044,271,280	(3.829.320)	(0,37)
Beban Pembulatan Gaji PNS	14,346	14,414	(68)	(0,47)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	69,723,160	72,549,502	(2.826.342)	(3,90)
Beban Tunj. Anak PNS	23,561,680	24,804,830	(1.243.150)	(5,01)
Beban Tunj. Struktural PNS	29,360,000	35,420,000	(6.060.000)	(17,11)
Beban Tunj. Fungsional PNS	1,245,060,000	1,201,345,000	43.715.000	3,64
Beban Tunj. PPh PNS	152,946,306	147,664,269	5.282.037	3,58
Beban Tunj. Beras PNS	55,184,040	54,532,260	651.780	1,20
Beban Uang Makan PNS	169,748,000	163,728,000	6.020.000	3,68
Beban Tunjangan Umum PNS	13,880,000	4,745,000	9.135.000	192,52
Beban Uang Lembur	0	0	0	0,00
Total Beban Pegawai	2,799,919,492	2,749,074,551	50.844.941	1,85

D.3. Beban Persediaan

*Beban
Persediaan : Rp.
49.470.220*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 49.470.220,- dan Rp. 21.264.730,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 38 Rincian Beban Persediaan per 30 Juni TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
--------	---------	---------	-------------	---

Beban Persediaan Konsumsi	36,318,500	14,492,250	21.826.250	151
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	13,151,720	6,772,480	6.379.240	94
Total Beban Persediaan	49.470.220	21.264.730	28.205.490	133

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa : Rp. 1.280.787.500

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.280.787.500,- dan Rp. 1.101.555.735,-. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dan barang dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 39 Rincian Beban Jasa per 30 Juni TA
(dalam satuan Rupiah)
dan TA 2022

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	138,000	0	138.000	100,00
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	5,000,000	(5.000.000)	(100,00)
Beban Langganan Listrik	111,519,274	86,711,432	24.807.842	28,61
Beban Langganan Telepon	1,046,428	960,783	85.645	8,91
Beban Langganan Air	24,891,870	30,115,920	(5.224.050)	(17,35)
Beban Sewa	40,470,000	47,520,000	(7.050.000)	(14,84)
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	650,000	0	650.000	100,00
Beban Keperluan Perkantoran	1,032,792,639	823,862,100	208.930.539	25,36
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	728,900	1,291,500	(1.284.211)	(99,44)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	36,000,000	34,200,000	1.800.000	5,26
Beban Barang Operasional Lainnya	33,272,000	71,894,000	(38.622.000)	(53,72)
Total Beban Jasa	1.280.787.500	1.101.555.735	179.231.765	16,27

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan:

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni dan 2022 adalah

Rp.
489.527.500

masing-masing sebesar Rp. 489.527.500,- dan Rp. 439.974.900,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang

berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 40 Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni TA 2023 dan TA 2022

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	225,000,000	213,977,000	11.023.000	5,15
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	70,000,000	70,000,000	0	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	194,527,500	155,997,900	38.529.600	24,70
Total Beban Pemeliharaan	489.527.500	439.974.900	49.552.600	11,26

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban
Perjalanan
Dinas : Rp.
92.347.000

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 92.347.000,- dan Rp. 82.752.000,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 41 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	92,347,000	82,752,000	9.595.000	11,59
Total Beban Perjalanan Dinas	92,347,000	82,752,000	9.595.000	11,59

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat :
Rp.0

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 42 Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 30 Juni TA 2023 dan TA 2022 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0

D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial : Rp. 0

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Beban bantuan sosial merupakan beban

pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari

terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode

yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0	0
Total Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp. 728.701.306

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 728.701.306,- dan Rp. 472.469.466,-.

Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai

suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk

periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 44 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 30 Juni TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	509,471,127	276,231,426	233.239.701	84,44
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	219,230,179	196,238,040	22.992.139	11,72
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
Jumlah Penyusutan	728.701.306	472.469.466	256.231.840	54,23
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset lain-lain	0	0	0	0
Jumlah Amortisasi	0	0	0	0
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	728.701.306	472.469.466	256.231.840	54,23

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih : Rp. 0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 45 Rincian Beban Piutang tak Tertagih
per 30 Juni TA 2023 dan TA 2022

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka	0	0	0	0

Pendek

Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	0	0	0	0
Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	0	0	0	0

D.11. Beban Lain-lain

Beban Lain-Lain : Rp. 0

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 46 Rincian Beban Lain-lain per 30 Juni TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Lain-lain	0	0	0	0

D.12. Kegiatan Non Operasional

Beban Kegiatan Non Operasional : Rp. 0

Pos Surplus (defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus (defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 47 Rincian Kegiatan Non Operasional per 30 Juni TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0	0	0	0

Penjualan Alat Angkut Darat	0	0	0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Penjualan Alat Kantor				
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	0	0	0	0

D.13. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar Biasa : Rp. 0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode

yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 48 Rincian Pos Luar Biasa per 30 Juni TA 2023 dan TA 2022 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Pendapatan PNPB	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal : Rp. 24.902.610.467

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 24.902.610.467,- dan Rp. 25.075.411.649,-.

E.2. Surplus (defisit) LO

Surplus(defisit) LO : Rp. (5.443.424.629)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp. (5.443.424.629),- dan Rp. (4.864.589.382),- Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Nilai Persediaan

*Koreksi Nilai
Persediaan :
Rp. 0*

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 49 Rincian Koreksi Nilai Persediaan
per 30 Juni TA 2023
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.4. Koreksi Aset Tetap

*Koreksi Aset
Tetap : Rp. 0*

Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Nilai koreksi nilai Aset Tetap tersebut adalah koreksi nilai Gedung dan Bangunan.

E.5. Koreksi atas Beban

*Koreksi Aset
Beban :
Rp. 0*

Koreksi Atas Beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Beban untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Rincian untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 50 Rincian Koreksi atas Beban
per 30 Juni TA 2023
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Beban Pegawai	0
Beban Jasa	0
Total Koreksi atas beban	0

E.6. Koreksi atas Pendapatan

*Koreksi atas
Pendapatan :
Rp. 0*

Koreksi Atas Pendapatan merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas

Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Rincian Koreksi Atas Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 51 Rincian Koreksi atas Pendapatan
per 30 Juni TA 2023
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Pendapatan Jasa Pelatihan	0
Pendapatan Lainnya	0
Total Koreksi atas Pendapatan	0

E.7. Ekuitas Akhir

*Ekuitas Akhir :
Rp.
24.356.542.770*

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 24.356.542.770,- dan Rp. 25.075.411.649,-.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak ada temuan atau tindak lanjut temuan BPK

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Tidak ada belanja secara akrual untuk periode tahun 2023

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Sumenep adalah:

1. BANK RAKYAT INDONESIA A/C 653244015601000 a.n. BPG 036 PA SUMENEP (401561) yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp.0.
2. BANK RAKYAT INDONESIA A/C 651544015611000 a.n. BPG 036 PA 1 SUMENEP (401561) yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILAG dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp.0.

F.2.4. Revisi DIPA

Pengadilan Agama Sumenep telah melakukan beberapa kali Revisi DIPA pada tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

1. DS:0910-2221-7205-5333 Revisi ke 01 Tanggal: 17 Februari 2023
2. DS:0910-2221-7205-5333 Revisi ke 02 Tanggal: 17 Mei 2022
3. DS:0910-2221-7205-5333 Revisi ke 03 Tanggal: 12 Juli 2022
4. DS:2782-4078-6680-2072 Revisi ke 04 Tanggal 11 Oktober 2022
5. DS:5447-0810-4076-0951 Revisi ke 05 Tanggal 26 Oktober 2022
6. DS:7434-2579-3778-4060 Revisi ke 06 Tanggal 29 November 2022
7. DS:7434-2579-3778-4060 Revisi ke 07 Tanggal 19 Desember 2023

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Untuk tahun anggaran 2023 Pengadilan Agama Sumenep tidak melakukan Permintaan Koreksi Data SPM ke KPPN Pamekasan.

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

Berdasarkan SK Pengelola Keuangan Anggaran Tahun Anggaran 2023 Nomor: W13-A30/42/KU.01/1/2023 tanggal 03 Januari 2023 telah di tunjuk Pejabat Pengelola Keuangan:

Kuasa Pengguna Anggaran: Elly Kusdiana Hobaidah, S.Ag.

Pejabat Pembuat Komitmen: Elly Kusdiana Hobaidah, S.Ag.

Pejabat Penandatangan/Penguji SPM: Samsul

Bendahara Pengeluaran: Hj. Afifa Aha

Bendahara Penerimaan: Kusno Rahardi, S.H.

Operator: Jzaak Firdaus Syafaat, S.T.

Operator: Guntur

Dan diperbarui dengan SK Pengelola Keuangan Anggaran Tahun Anggaran 2023 Nomor: W13-A32/1675/KU.01/8/2023 tanggal 04 Agustus 2023 telah di tunjuk Pejabat Pengelola Keuangan:

Kuasa Pengguna Anggaran: Elly Kusdiana Hobaidah, S.Ag.

Pejabat Pembuat Komitmen: Elly Kusdiana Hobaidah, S.Ag.

Pejabat Penandatangan/Penguji SPM: Samsul

Bendahara Pengeluaran: Kamelia Elfani Sodiqoh, A.Md.A.B.

Bendahara Penerimaan: Kusno Rahardi, S.H.

Operator: Jzaak Firdaus Syafaat, S.T.

Operator: Indah Sulistya, S.E.

LAPORAN PENDUKUNG

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN
NILAI BUKU ASET TETAP*

Pengadilan Agama Sumenep

Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap

untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2023

Rincian nilai perolehan, Akumulasi Penyusutan, dauku A Tetap untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2023

No.	Aset Tetap	Kuantitas	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
A.	Tanah	7.155	17.358.918.000	0	17.358.918.000
1.	TANAH PERSIL	7.155	17.358.918.000	0	17.358.918.000
A.	Peralatan dan Mesin	433	4.421.113.448	2.904.640.601	1.516.472.847
1.	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	9	441.768.903	441.768.903	0
2.	ALAT KANTOR	50	252.990.500	252.990.500	0
3.	ALAT RUMAH TANGGA	201	764.426.915	724.924.457	39.502.458
4.	ALAT STUDIO	15	143.458.420	66.755.582	76.702.838
5.	ALAT KOMUNIKASI	5	13.995.000	13.995.000	0
6.	PERALATAN PEMANCAR	1	199.500.000	9.975.000	189.525.000
7.	ALAT LABORATORIUM FISIKA	2	10.000.000	666.668	9.333.332
8.	NUKLIR/ELEKTRONIKA"	74	816.742.860	614.764.265	201.978.595
9.	KOMPUTER UNIT	75	1.778.118.850	778.688.226	999.430.624
10.	PERALATAN KOMPUTER	1	112.000	112.000	0
B.	Gedung dan Bangunan	6	7.112.928.000	1.099.574.541	6.013.353.459
1.	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	5	6.334.962.000	1.044.092.660	5.290.869.340
2.	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	1	777.966.000	55.481.881	722.484.119
C.	Aset Tetap Lainnya	40	21.075.629	0	21.075.629
1.	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	19	1.501.309	0	1.501.309
2.	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	21	19.574.320	0	19.574.320
D.	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	68	10.471.653	10.471.653	0
1.	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	4	3.253.253	3.253.253	0
2.	ALAT KANTOR	43	6.176.250	6.176.250	0
3.	ALAT RUMAH TANGGA	21	1.042.150	1.042.150	0
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		28.924.506.730	4.014.686.795	24.909.819.935
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya		28.924.506.730	4.014.686.795	24.909.819.935

B. INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL

Halaman ini bukan bagian dari laporan keuangan.

Silahkan ganti halaman ini dengan laporan realisasi belanja akrual (dari menu neraca akrual aplikasi komdanas)



Catatan atas
Laporan Keuangan

005

01

0500

401561

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA SUMENEP
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni TAHUN 2023

{halaman ini untuk cover di samping/punggung saat dijilid}

DRAFT